



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 903 / 806 / BAPPELITBANGDA

NOMOR : 903 / 294 / DPRD

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., MAP
Jabatan : Bupati Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem.
2. a. Nama : I Gede Dana, S.Pd., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
b. Nama : I Nengah Sumardi, SE., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
c. Nama : I Made Agus Kertiana, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
d. Nama : I Wayan Parka, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Amlapura, 3 September 2020

BUPATI KARANGASEM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

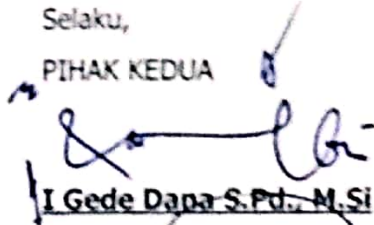
Selaku,

Selaku,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., MAP


I Gede Dapa S.Pd., M.Si

KETUA


I Nengah Sumardi, SE, M.Si

WAKIL KETUA


I Made Agus Kertiana, SH

WAKIL KETUA


I Wayan Parka, SH

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021. RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (top-down/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dikenal dengan Musrenbang.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakatii bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021, berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen - instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang memaduserasikan hasil Musrenbang, RKPD Tahun 2020, arah kebijakan pembangunan daerah serta kebijakan dan prioritas Pemerintah Pusat.
2. Tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mulai dari tahap penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD.
3. APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar Perangkat Daerah guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (*penganggaran terpadu/unified budgeting*).
4. APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ke kelima (terakhir) pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021, sehingga dalam perencanaannya harus memaduserasikan visi, misi dan prioritas program dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Rencana anggaran disusun berdasarkan

perkiraan maju (*forward estimate*) yang memperhitungkan kebutuhan dana tahun anggaran berikutnya sesuai rencana target pencapaian kinerja dalam 5 tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 sesuai ketentuan dalam pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu KUA berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPA-S) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 pada khususnya serta perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Karangasem. Sehingga arah kebijakan ekonomi Kabupaten Karangasem disinergikan dengan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali dan Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem, dilakukan melalui upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal APBD yang berpihak terhadap upaya-upaya dimaksud. Disamping itu, kondisi sosial dan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 diperkirakan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan sangat tergantung atau banyak sekali dipengaruhi oleh *consumption*. Dengan adanya kebijakan mengenai *social distancing, work from home (WFH)* dan PSBB, tentu konsumsi akan mengalami penurunan yang sangat tajam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah negative serta penundaan belanja investasi.
2. Pemberian insentif oleh Pemerintah dari sisi perpajakan, menciptakan pengaruh untuk mendorong aktivitas ekonomi.

3. Arah Kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan pada sektor industri, pariwisata, investasi, reformasi sosial dan ketahanan bencana diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
4. Kemudahan proses perijinan selain regulasi tata ruang, keamanan daerah dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem.
5. Pengembangan pariwisata berbasis desa adat yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat serta diintegrasikan dengan potensi unggulan yang dimiliki diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
6. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diharapkan mampu mendorong swasembada pangan masyarakat dalam menghadapi situasi pasca pandemic covid 19.
7. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga didukung pelatihan-pelatihan keterampilan bagi masyarakat diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang.
8. Peningkatan penerapan dan penguasaan teknologi diharapkan mampu menghasilkan produk yang inovatif dan memiliki daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi.
9. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan budaya dan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian Kabupaten Karangasem Tahun 2021 diperkirakan tetap optimis. Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Peran Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang dapat mengukur perkembangan pembangunan suatu daerah, indikator tersebut diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta mengatasi pengangguran dan menekan kesenjangan ekonomi.

Menurunnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China secara tidak langsung memberi dampak yang baik terhadap perdagangan dalam negeri, namun belum berakhir perang dagang tersebut muncul *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dimana wabah ini pertama kali muncul di daerah Hubei, Wuhan, China tepatnya tanggal 17 Nopember 2019 dan dipublikasi di Bulan Desember 2019 dan menyebar hampir di 210 negara pada bulan Mei 2020. Tidak terkecuali Indonesia yang pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona.

Dengan cepatnya penularan COVID-19 dan belum adanya vaksin untuk mengobati penyakit tersebut, maka langkah antisipasi pemerintah diantaranya membatasi keluar rumah, membatasi keramaian dan beberapa akses pintu keluar masuk ditutup termasuk penerbangan, hal ini berakibat menurunnya daya beli masyarakat dan berdampak pada menurunnya roda perekonomian Negara. Kebijakan dibidang moneter juga diambil pemerintah dengan refocusing anggaran yang disalurkan dari pusat kedaerah dengan menitikberatkan pada penanganan COVID-19 sehingga dana untuk infrastruktur diluar pendidikan dan kesehatan dialihkan pemanfaatannya.

Bali yang menitikberatkan perekonomiannya dari sektor pariwisata menjadi pukulan yang berat karena dengan ditutupnya penerbangan dan daerah tujuan wisata, berakibat menurunnya pendapatan dari sektor pariwisata dan berdampak juga pada sektor-sektor yang lain, begitu juga dengan Kabupaten Karangasem yang mengandalkan pendapatan daerahnya dari sektor pariwisata, pertanian dan pertambangan juga mengalami penurunan produksi.

Perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Karangasem berdasarkan data terakhir tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerahnya, hal ini terlihat pada data PDRB Kabupaten Karangasem. Secara umum rata-rata pertumbuhan ekonomi masih berada dalam rata-rata nasional, hal ini ditunjukkan dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi Karangasem sekitar 5,59 persen.

Pertumbuhan ekonomi Karangasem pada tahun 2019 tidak terlepas dari pertumbuhan sektor-sektor yang menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Karangasem. Dari tujuh belas sektor ekonomi, dilihat dari Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2010, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2019. Dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tahun 2019 sebesar 5,50% meningkat sebesar 0,02% jika dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 5,48%.

Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Sektor Pendidikan (8,89%); Sektor Jasa lainnya (8,39%); Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,17%); disusul oleh sektor-sektor lain, seperti disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4,68	2,25	2,41	2,80	2,85	3,00
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,60	-0,51	-2,05	-2,05	5,19	-0,40
C	Industri Pengolahan	7,60	4,14	2,39	5,97	5,39	5,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,51	7,05	7,30	3,97	6,11	4,99
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,60	7,78	6,85	5,76	7,52	6,70
F	Konstruksi	6,79	8,30	9,55	9,59	6,32	8,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,32	6,84	7,60	8,64	6,30	7,14
H	Transportasi dan Pergudangan	8,18	9,16	6,78	6,95	6,84	7,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,73	9,47	8,61	8,21	8,17	8,24
J	Informasi dan Komunikasi	6,01	9,40	9,37	7,96	6,44	7,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,83	7,53	2,53	2,34	7,41	5,13
L	Real Estate	5,48	4,91	6,33	4,74	4,72	5,24
M,N	Jasa Perusahaan	6,95	5,47	9,78	6,56	5,60	6,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,15	5,39	-0,05	3,10	3,05	3,53
P	Jasa Pendidikan	9,60	8,59	8,60	8,08	8,89	8,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,87	9,59	13,87	8,74	7,58	9,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,86	8,13	8,90	9,98	8,39	8,65
Laju Pertumbuhan Ekonomi		6,00	5,92	5,06	5,48	5,50	5,59

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, diolah

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2019 sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2019
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB	
		Harga Berlaku (%)	Harga Konstan 2010 (%)
1	2	3	4
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5,17	2,85
B	Pertambangan dan Penggalian	5,85	5,19
C	Industri Pengolahan	7,12	5,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,71	6,11
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,39	7,52
F	Konstruksi	9,54	6,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,96	6,30
H	Transportasi dan Pergudangan	8,36	6,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,66	8,17
J	Informasi dan Komunikasi	8,36	6,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,79	7,41
L	Real Estate	6,80	4,72
M,N	Jasa Perusahaan	6,91	5,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,92	3,05
P	Jasa Pendidikan	11,80	8,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,55	7,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya	12,14	8,39
Laju Pertumbuhan PDRB		8,73	5,50

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha

Perkembangan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2019 sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
PDRB Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2019

No	Lapangan Usaha	PDRB		PDRB	
		Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	
		(Juta Rupiah)		(Juta Rupiah)	
		2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4.002.763,70	4.209.684,00	2.573.879,90	2.647.255,40
B	Pertambangan dan Penggalian	476.152,30	503.987,80	323.360,70	340.145,60
C	Industri Pengolahan	631.557,30	676.529,80	431.154,90	454.390,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.673,70	16.882,40	9.467,70	10.045,90
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.394,80	22.106,40	16.542,40	17.785,80
F	Konstruksi	1.003.686,80	1.099.394,50	696.687,00	740.708,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	871.438,10	940.821,50	616.840,60	655.684,50
H	Transportasi dan Pergudangan	2.795.204,60	3.028.978,60	1.731.633,20	1.849.999,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.801.214,80	2.011.223,00	1.015.871,70	1.098.838,80
J	Informasi dan Komunikasi	502.110,10	544.074,00	445.755,30	474.457,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	685.749,90	752.889,00	453.236,60	486.809,90
L	Real Estate	616.499,90	658.421,90	489.165,90	512.260,10
M,N	Jasa Perusahaan	121.021,60	129.386,10	83.878,40	88.576,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.249.592,40	1.311.101,20	906.096,20	933.714,50
P	Jasa Pendidikan	393.794,20	440.262,00	281.842,50	306.889,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	326.659,00	357.866,60	237.960,50	255.997,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	359.384,30	403.026,10	241.015,00	261.236,50
PDRB		15.872.897,60	17.106.634,90	10.554.388,50	11.134.797,00

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Berdasarkan atas harga berlaku, nilai absolute PDRB Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 mencapai 17.106.634,90 juta rupiah meningkat 1.233.737,30 juta rupiah (7,77 %) dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 15.872.897,60 juta

rupiah. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2019 sebesar 1.233.737,30 juta rupiah terjadi pada semua sektor ekonomi.

2.1.3 Struktur Ekonomi

Pada tahun 2019, struktur perekonomian daerah Kabupaten Karangasem masih didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi sebesar 61,84 %, meningkat sebesar 0,95 % dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 61,25 %.

Sektor sekunder sebesar 10,61 %, mengalami peningkatan sebesar 0,76 % dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 10,53 %. Sedangkan sektor primer kontribusinya sebesar 27,55 %, turun sebesar 2,37 % dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 28,22 %.

Tabel 2.4
Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan Kontribusi Sektor
Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2018-2019

Sektor	2018		2019	
	Nilai (Milyar Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Milyar Rp)	Kontribusi (%)
1	2	3	4	5
Primer	4.478,92	28,22	4.713,67	27,55
Sekunder	1.671,31	10,53	1.814,91	10,61
Tersier	9.722,67	61,25	10.578,05	61,84
PDRB	15.872,90	100,00	17.106,63	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

2.1.4 Distribusi Pendapatan

Pembangunan yang dilaksanakan hendaknya tidak hanya mengejar tingkat pertumbuhan yang tinggi semata, tetapi juga harus memperhatikan azas pemerataan tanpa mengganggu stabilitas nasional. Pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa dibarengi dengan pemerataan pendapatan itu akan menimbulkan terjadinya kesenjangan sosial, artinya jurang si kaya dan si miskin akan semakin lebar.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Gini Ratio, semakin tinggi nilai gini ratio maka semakin

timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah nilai gini ratio berarti semakin merata distribusi pendapatan daerahnya.

Perkembangan nilai gini ratio Kabupaten Karangasem pada tahun 2014 (0,34), tahun 2015 (0,31), tahun 2016 (0,29), tahun 2017 (0,32) dan tahun 2018 (0,34). Dengan melihat angka indeks gini ratio dari tahun 2014 sampai tahun 2018, Kabupaten Karangasem masih tergolong dalam tingkat ketidakmerataan rendah. Walaupun terjadi fluktuasi indeks gini ratio perlu kiranya strategi untuk dapat meningkatkan tingkat pemerataan pendapatan di antara penduduk di Kabupaten Karangasem.

2.1.5 PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita merupakan suatu gambaran untuk melihat tingkat pendapatan masyarakat secara umum, sehingga pemerintah dapat menilai pengaruh kinerja pembangunan yang telah berjalan terhadap tingkat perekonomian masyarakatnya.

PDRB per kapita dihitung dengan membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah per penduduk, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan real dari pendapatan perkapita. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.5, perkembangan PDRB perkapita dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2015, PDRB perkapita ADHB Kabupaten Karangasem baru mencapai 29,93 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2019 telah mencapai 41,06 juta rupiah. Namun demikian, peningkatan nilai PDRB perkapita (baik riil maupun nominalnya) belum mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena angka ini hanya merupakan angka makro tanpa melihat distribusi pendapatan dan lain sebagainya.

Tabel 2.5
Beberapa Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Karangasem
Tahun 2015 - 2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	12.233,23	13.410,89	14.598,38	15.872,90	17.106,63
2	PDRB Harga Konstan 2010 (Milyar Rp)	8.991,75	9.524,23	10.006,13	10.554,39	11.134,80
3	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa) *	408,70	410,80	412,82	414,80	416,60
4	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rp)	29,93	32,65	35,50	38,46	41,06
5	PDRB Per Kapita Harga Konstan 2010 (Juta Rp)	22,00	23,18	24,24	25,45	26,73

Keterangan : *) Hasil Proyeksi Penduduk BPS

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

2.1.6 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu Negara. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah Kabupaten Karangasem maka laju inflasi harus dapat dikendalikan agar daya beli masyarakat dapat terjangkau, dimana kisaran inflasi dianggap ideal yaitu dibawah 10 %. Pada tahun 2019 berdasarkan data ekspose dari BI laju inflasi Kabupaten Karangasem disetarakan dengan laju rata-rata inflasi yang mengacu pada perhitungan inflasi yang terjadi di kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng.

Tabel 2.6
Laju Inflasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng
Tahun 2015 – 2019 (Persen)

No	Laju Inflasi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Denpasar	2,70	2,94	3,31	3,40	2,37
2	Kabupaten Buleleng	2,97	4,57	3,38	1,88	2,42

Sumber : BPS Provinsi Bali

Besaran inflasi di Kota Denpasar pada tahun 2019 sebesar 2,37% sedangkan di Kabupaten Buleleng sebesar 2,42%. melihat angka tersebut mengindikasikan kirasan inflasi di Kabupaten Karangasem sekitar angka tersebut mengingat kebutuhan masyarakat di Kabupaten Karangasem hampir sama dengan masyarakat di Bali. Dimana besaran inflasi di Kota Denpasar ada enam kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi (m to m) yaitu kelompok II (makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) setinggi 2,21 persen; kelompok I (bahan makanan) setinggi 1,36 persen; kelompok V (kesehatan) setinggi 0,88 persen; kelompok VII (transpor, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,55 persen; kelompok VI (pendidikan, rekreasi, dan olahraga) setinggi 0,14 persen; dan kelompok III (perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar) setinggi 0,09 persen. Sedangkan di Kabupaten Buleleng laju inflasinya sebesar 2,42% dimana Inflasi (m to m) ditunjukkan oleh meningkatnya indeks pada lima kelompok pengeluaran yaitu kelompok II (makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau) setinggi 0,65 persen; kelompok I (bahan makanan) setinggi 0,58 persen; kelompok IV (sandang) setinggi 0,32 persen; kelompok VII (transpor, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,14 persen; serta kelompok V (kesehatan) setinggi 0,04 persen. Sedangkan kelompok yang tercatat mengalami penurunan indeks atau deflasi adalah kelompok VI (pendidikan, rekreasi, dan olahraga) sedalam -0,37 persen; dan kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar) sedalam -0,11 persen.

Untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi sehingga terjangkau daya beli masyarakat maka pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Bank Indonesia mengadakan kerjasama membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

2.1.7 Kebutuhan Kesempatan Kerja

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dan diperkirakan akan tetap semakin meningkat. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Kabupaten Karangasem sebanyak 313.485 orang, dengan angkatan kerja sebanyak 252.932 orang yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 251.406 dan penduduk yang mencari pekerjaan sebanyak 1.526. Dengan demikian tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 mencapai 80,68%, dengan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 0,60 persen.

Tabel 2.7

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Karangasem tahun 2018-2019

NO	Kondisi Ketenagakerjaan	2018	2019
1	Penduduk Usia Kerja	310.312	313.485
2	Angkatan Kerja	256.003	252.932
	a. Bekerja	253.469	251.406
	b. Mencari Pekerjaan	2.534	1.526
3	Bukan Angkatan Kerja	54.309	60.553
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	82,50	80,68
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,99	0,60

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

2.1.8 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta

pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.

Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem selama tahun 2015-2019 berfluktuatif. Namun tahun terakhir 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan, dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem pada tahun 2015 sebanyak 30.330 jiwa (7,44%), tahun 2016 sebanyak 27.120 jiwa (6,61%), tahun 2017 sebanyak 27.020 jiwa (6,55%), tahun 2018 sebanyak 26.020 jiwa (6,26%) dan tahun 2019 sebanyak 25.990 jiwa (6,25%) seperti terlihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karangasem Tahun 2015 – 2019

Tahun	Garis Kemiskinan (GK)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	269.866	30.330	7,44
2016	288.436	27.120	6,61
2017	301.720	27.020	6,55
2018	311.321	26.020	6,28
2019	315.805	25.990	6,25

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Karangasem sebagai bagian dari Provinsi Bali masih menyimpan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Peningkatan besaran Garis Kemiskinan (GK) bisa diartikan sebagai peningkatan jumlah pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup berupa makanan dan non makanan. Apabila Garis Kemiskinan (GK) di Karangasem naik sedangkan tingkat pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang berarti, akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem.

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2018 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang berhimpas pada meningkatnya produktivitas dan daya beli masyarakat secara umum di Kabupaten Karangasem. Dalam upaya merumuskan program pengentasan kemiskinan peran pemerintah sangat penting terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.

2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, disamping adanya Pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara tak hanya menyerang sektor kesehatan, tetapi juga perekonomian global yang secara tidak langsung berdampak terhadap perkembangan makro ekonomi Kabupaten Karangasem, adapun target makro ekonomi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,00 persen, Tahun 2016 sebesar 5,92 persen, Tahun 2017 sebesar 5,06 persen, Tahun 2018 sebesar 5,48 persen dan pada tahun 2019 sebesar 5,50 persen, dengan rata-rata 5,59 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan ekonomi global dan nasional.

Dengan memperhatikan perkembangan penyebaran COVID-19 yang sangat berdampak pada perlambatan perputaran ekonomi global, nasional dan daerah. Berbagai langkah strategis telah diambil baik dari kebijakan fiskal maupun protocol kesehatan. Pentingnya pengambilan keputusan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk memitigasi risiko penyebaran COVID-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta bersinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi yang erat dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem pada RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 ditargetkan sebesar 6,09 persen. Sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem diperkirakan akan mengalami perlambatan sepanjang tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19 dan diperkirakan pada tahun 2021 berada pada angka di bawah 4 persen sebagai akibat melemahnya sektor pariwisata, industri dan investasi. Berdasarkan kondisi tersebut target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dipasang pada angka 3,44 persen atau pada kisaran 3-4 persen.

2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2021 berdasarkan harga berlaku ditargetkan mencapai 17,695 trilyun rupiah lebih. Sedangkan PDRB Kabupaten Karangasem berdasarkan harga konstan 2010 ditargetkan mencapai 11,517 trilyun rupiah lebih. Target tersebut dapat dicapai apabila produksi daerah mampu ditingkatkan dan harga-harga produksi tidak mengalami penurunan. Walaupun terjadi pandemi Covid-19, Kabupaten Karangasem yang perputaran ekonominya dominan ditopang oleh sektor pertanian dalam arti luas, hal ini dapat memberikan harapan akan pertumbuhan ekonomi, walaupun terjadi perlambatan.

2.3.3 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2019 didominasi sektor tersier dengan kontribusi sebesar 61,8%, sektor primer memberikan kontribusi 27,6% dan sektor sekunder sebesar 10,6%. Sejalan dengan perkembangan pembangunan maka pada tahun 2021 secara berangsur-angsur sektor primer akan bergeser ke sektor tersier terutama disektor jasa, namun demikian guna mempertahankan ketahanan pangan maka sektor primer harus tetap mendapatkan perhatian.

2.3.4 Distribusi Pendapatan

Kabupaten Karangasem diharapkan bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Adanya sistem pembangunan ekonomi kerakyatan memungkinkan seluruh potensi masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup melalui berbagai kegiatan ekonomi, melalui program pemerintah pusat dimana alokasi

dana desa yang langsung turun kedesa tanpa melalui Kabupaten tujuannya yaitu terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan pada tahun 2021 pemerataan pendapatan masyarakat yang diukur dengan indek gini ditargetkan sebesar 0,33.

2.3.5 PDRB Perkapita

PDRB Kabupaten Karangasem berdasarkan harga berlaku tahun 2016 sebesar 13,56 trilyun rupiah, dengan PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku tahun 2016 sebesar 33,02 juta rupiah. Sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2010 tahun 2016 sebesar 23,19 juta rupiah. Sehingga pada tahun 2021 PDRB perkapita atas dasar harga belaku ditargetkan sebesar 41 – 42 juta rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan ditargetkan sebesar 24 – 27 juta rupiah dengan asumsi pertumbuhan penduduk mencapai maksimum 1,00 %.

2.3.6 Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Tingkat inflasi di Provinsi Bali yang dihitung berdasarkan survey di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi dikisaran 1,88 % - 4,57 %, namun masih dalam batas kewajaran karena masih di bawah dua digit, namun demikian sekiranya stabilitas perekonomian daerah perlu dikendalikan. Dengan terbentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah diharapkan stabilitas perekonomian daerah dapat terjaga, khususnya terhadap harga barang - barang kebutuhan pokok masyarakat, sehingga pada tahun 2021 inflasi akan dikendalikan pada kisaran 3 ± 1 %.

2.3.7 Kesempatan Kerja

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem sesuai dengan target RPJMD ditargetkan sebesar maksimal 1 persen. Jumlah dan persentase pengangguran diprediksikan akan semakin bertambah sejalan dengan banyaknya tenaga kerja khususnya pada sektor jasa, pariwisata yang dirumahkan bahkan di PHK sebagai akibat dari wabah

Covid-19. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 ditargetkan pada kisaran maksimal 1-2 persen. Dengan diberlakukannya tatanan penerapan kehidupan era baru di Provinsi Bali maupun di Kabupaten Karangasem diharapkan kondisi pariwisata pulih kembali sehingga membuka peluang dan kesempatan kerja.

2.3.8 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 sebesar 6,25% dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 25.990 jiwa menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 26.020 jiwa atau 6,28%, mengalami penurunan dengan selisih sebesar 0,03% dari tahun 2018. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Karangasem menunjukkan angka 0,83 pada tahun 2018 dan turun menjadi 0,75 pada tahun 2019 sehingga ada penurunan kedalaman kemiskinan. Begitu juga pada Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Karangasem menunjukkan angka 0,22 pada tahun 2018 turun drastis pada tahun 2019 menjadi 0,14.

Namun demikian dengan mewabahnya Covid-19 secara global maupun nasional, persentase angka kemiskinan secara nasional terjadi kenaikan sebesar 0,5%, angka kenaikan kemiskinan Provinsi Bali sebesar 0,35% sehingga pada tahun 2021 diprediksi mengalami kenaikan sebesar 0,04% sehingga menjadi 6,29% dari capaian tahun 2019 sebesar 6,25%.

2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 2) Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merencanakan target PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta ketentuan perundang-undangan terkait.
- b. Peraturan daerah tentang pajak dan redistribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah.
- c. Hasil pendapatan BLUD RSUD termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dibagi kedalam 2 Kolompok yaitu :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa yang direncanakan dengan memperhatikan alokasi tahun anggaran 2020 serta realisasi tahun anggaran 2019. Dana Perimbangan dikategorikan dalam 2 kelompok yakni Dana Transfer Umum yang terdiri dari : 1) Dana Bagi Hasil; 2) Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari : 1) Dak Fisik dan 2) DAK Non Fisik diman tahun 2021.
- b. Dana Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang direncanakan dengan memperhatikan alokasi tahun anggaran 2020.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa bantuan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik untuk SD dan SMP.

2.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara

pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata serta ekonomi kreatif, pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis, serta peningkatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektifitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

2.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana yang diakibatkan oleh selisih antara pendapatan daerah setelah dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, adalah : Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan, adalah Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2021

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2021

Dengan mewabahnya pandemic covid 19, kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif dan perekonomian domestik diperkirakan akan mengalami dampak yang cukup hebat. Berdasarkan pola penyebaran Covid 19, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian yang relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, Industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem Kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, jaminan Kesehatan dan SDM Kesehatan terutama untuk deteksi dan surveillans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat Kesehatan. Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan pada hampir semua aspek kehidupan. Hal ini dimulai dari aktivitas ekonomi yang terganggu diindikasikan menurunnya FDI Dunia 30-40%, perdagangan dunia juga turun 13-32%, perjalanan turis dunia turun 40%. Karena aktivitas perekonomian terganggu maka dunia dapat mengalami resesi ekonomi sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Untuk mengatasi dampak Covid-19, arah kebijakan pembangunan dalam RKP 2021 difokuskan pada (1) pemulihan industri pariwisata dan investasi, (2) reformasi sistem Kesehatan nasional, (3) reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan (4) reformasi sistem ketahanan bencana.

Berdasarkan data BPS, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2020 tumbuh sebesar 2,97 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan berkontraksi 2,41 persen secara kuartalan. Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I 2020 melambat cukup dalam dari 5,07 persen pada kuartal I 2019. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II Tahun 2020 yaitu minus 3,8 persen yang merupakan imbas pandemic virus corona yang masuk ke Indonesia pada pertengahan Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua ini mengalami tekanan yang sangat tinggi yang disebabkan oleh ekspor menurun sejalan dengan

kontraksi perekonomian global sementara konsumsi rumah tangga dan investasi menurun sejalan dengan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi aktivitas ekonomi. Namun diperkirakan pada kuartal III dan IV pertumbuhan ekonomi nasional akan berangsur-angsur membaik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan ditentukan oleh pemulihan ekonomi pada kuartal III dan IV tahun 2020.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, tema RKP tahun 2021 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5 – 5,5 persen dengan asumsi masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi dan perdagangan internasional yang berangsur pulih akibat covid 19 dan tidak terjadi second wave penyebaran covid 19.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,78 -72,90;
4. Gini rasio pada kisaran 0,377 - 0379;
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kisaran 7,5 – 8,2 persen.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021

Pengaruh Pandemi Virus Corona menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem setelah sektor Pertambangan. Asumsi ini berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sehingga diharapkan pada tahun 2021 Kabupaten Karangasem dapat lepas dan bangkit dari situasi saat ini.

Beberapa asumsi yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah :

- (1) Pulihnya kondisi perekonomian daerah pasca penerapan tatanan kehidupan era baru,
- (2) Perkembangan industri kepariwisataan dan investasi semakin membaik,

- (3) Penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari pusat dan provinsi cenderung mengalami penurunan, namun proyeksi pendapatan asli daerah cenderung stabil.
- (4) Tidak terjadinya kenaikan harga BBM dan listrik.

3.2 Lain-lain asumsi

Selain asumsi dasar sebagaimana diuraikan di atas beberapa asumsi lainnya yang dijadikan dasar dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- (1) Kebutuhan belanja pegawai masih mengacu pada tahun anggaran 2020.
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan publik,
- (3) Stabilitas keamanan tetap kondusif dan tidak terjadi bencana.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021

Pendapatan daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD lainnya yang sah. Pendapatan transfer dapat berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini disamping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam tahun anggaran 2021 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.478.506.367.491,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 258.110.008.273,00. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - a) Pajak Daerah, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 124.436.802.630,00.

- b) Retribusi Daerah, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 15.925.536.000,00.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 11.260.598.088,00.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 106.487.071.555,00.
2. Pendapatan Transfer dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.163.524.259.218,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.052.496.890.000,00, yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dana Perimbangan, dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 970.693.234.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Dana Transfer Umum dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 737.126.269.000,00 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 20.872.896.000,00 dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 716.253.373.000,00
 - B. Dana Transfer Khusus dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 233.566.965.000,00 yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp. 88.000.583.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 145.566.382.000,00
 - 2) Dana Desa dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 81.803.656.000,00
 - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 111.027.369.218,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil, dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 74.562.652.018,00
 - 2) Bantuan Keuangan, dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 36.464.717.200,00.

- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 56.872.100.000 yang bersumber dari Dana Hibah dari pemerintah Pusat untuk pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Secara lengkap Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	JUMLAH DANA
4	PENDAPATAN DAERAH	1.478.506.367.491
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	258.110.008.273
4.1.01	Pajak Daerah	124.436.802.630
4.1.02	Retribusi Daerah	15.925.536.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.260.598.088
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	106.487.071.555
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.163.524.259.218
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.052.496.890.000
1)	<i>Dana Perimbangan</i>	<i>970.693.234.000</i>
a.	Dana Taransfer Umum :	737.126.269.000
	1) Dana Bagi Hasil	20.872.896.000
	2) Dana Alokasi Umum	716.253.373.000
b.	Dana Taransfer Khusus :	233.566.965.000
	1) DAK Fisik	88.000.583.000
	2) DAK Non Fisik	145.566.382.000
2)	<i>Dana Desa</i>	<i>81.803.656.000</i>

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	111.027.369.218
1)	Pendapatan Bagi Hasil	74.562.652.018
2)	Bantuan Keuangan	36.464.717.200
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.872.100.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	56.872.100.000
1)	Hibah	56.872.100.000
	Jumlah Pendapatan	1.478.506.367.491

BAB V

KABIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata serta ekonomi kreatif, pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis, serta peningkatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektifitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Arah Kebijakan belanja daerah yang disempurnakan dan secara khusus diarahkan pada :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari Volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat dan untuk tahun 2021 difokuskan pada reformasi kesehatan pasca covid-19.
4. Kegiatan-kegiatan untuk pelayanan publik kepada masyarakat.
5. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial maka untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi serta dalam rangka menambah sumber-sumber pendapatan daerah maka anggaran belanja akan diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
6. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial maka untuk menjaga kondisi sosial, belanja diarahkan untuk menjamin perlindungan sosial terutama kepada masyarakat yang rentan sehingga tidak masuk ke kondisi yang lebih dalam.
7. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial khususnya dalam rangka menghadapi bencana baik bencana alam maupun non alam, maka anggaran difokuskan untuk pencegahan, penanggulangan dan ketahanan bencana daerah.
8. Dalam rangka mengantisipasi dampak pasca Covid 19 khususnya sektor tenaga kerja, anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kursus dan pelatihan serta peningkatan kesempatan kerja.

9. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, belanja juga diarahkan pada pemeliharaan aset pusaka, cagar budaya serta pelestarian seni dan budaya daerah yang tentunya juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Dalam tahun anggaran 2021 Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga direncanakan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 1.167.189.928.115,00 yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 762.057.169.148,00
 - b. Belanja Barang dan jasa sebesar rp. 398.243.365.719,00
 - c. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp. 6.130.993.248,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp. 758.000.000,00
2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 134.712.052.454,00 yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 34.555.879.242,00
 - b. Belanja Modal bangunan dan Gedung direncanakan sebesar Rp. 29.760.188.652,00
 - c. Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp. 60.956.280.000,00
 - d. Belanja Modal Aset tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp. 9.439.704.560,00
3. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp. 198.004.386.992,00 yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi hasil direncanakan sebesar Rp. 18.247.104.022,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 179.757.282.900,00
4. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan dihitung berdasarkan besarnya SiLPA tahun sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan direncanakan mencapai Rp. 30.000.000.00,00. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan belanja daerah, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk Penyertaan modal pemerintah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada PT Bank BPD Bali, Perusahaan Daerah Giri Tohlangkir dan PT. Jamkrida Bali Mandara. Dari jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 sehingga jumlah pembiayaan netto dalam RAPBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 26.000.000.000,00 yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan daerah dengan belanja daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya pencapaian dengan tetap memperhatikan tatanan kehidupan era baru. Upaya-upaya pencapaian target tersebut diantaranya :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan
- b. Mengintensifkan penerimaan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui Penyelenggaraan pelayanan prima, penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, pemanfaatan teknologi informatika serta penguatan regulasi.
- c. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah
- d. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Transfer Antar Daerah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2021 yang disusun melalui berbagai pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan politis, yaitu KUA ditetapkan dengan Nota Kesepakatan setelah melalui pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan DPRD Kabupaten Karangasem;
- b. Pendekatan partisipatif, yaitu disamping dibahas oleh wakil-wakil rakyat, KUA merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Karangasem. RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah dan Musrenbang;
- c. Pendekatan teknokratis, yaitu KUA berpedoman pada RKPD yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Perangkat Daerah berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Karangasem.

Selanjutnya dokumen KUA ini dituangkan ke dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	534.892.046.212	
1.01.2.19.0.00.03.00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	534.892.046.212	
1.01.2.19.0.00.03.00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	534.892.046.212	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	447.185.002.892	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	644.712.500	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	405.220.000	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.330.000	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.955.000	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	29.965.000	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	47.762.500	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.480.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	442.202.019.950	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	441.864.534.950	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	337.485.000	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.260.000	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.260.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.912.500	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.912.500	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.135.067.550	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.236.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.964.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.923.828.950	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.038.600	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.830.400	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.250.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.580.400	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.199.992	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.099.992	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.500.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	219.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	87.666.844.820	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	55.997.097.645	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	447.132.500	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.087.301.170	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	335.019.830	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.619.322.100	
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	4.248.714.120	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.995.400	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	89.800.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.124.817.225	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	34.995.300	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	36.000.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.949.113.225	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	688.351.500	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	427.592.500	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	524.072.200	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	215.301.000	
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	326.529.875	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	220.185.500	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.999.725	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	87.097.250	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.758.493.925	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	66.399.750	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20.625.090.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.642.325.200	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	26.400.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	237.517.750	
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	371.658.250	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	57.887.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100.281.800	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	4.993.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	664.318.700	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	560.068.700	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.619.200.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.078.308.750	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1.891.585.200	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	84.123.150	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	102.600.400	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	40.198.500	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	40.198.500	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	40.198.500	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	323.660.023.454	
1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	323.660.023.454	
1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	171.103.495.586	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.959.804.236	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.121.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.400.200	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.771.650	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.801.450	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.119.350	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.028.350	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.868.337.136	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.773.533.236	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	94.803.900	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.177.100	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.902.800	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.749.200	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235.325.100	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.200.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.500.000	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97.400.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	731.100.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.669.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	414.421.400	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.500.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93.747.600	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	117.618.388.450	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.676.464.851	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	5.493.858.350	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	239.195.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.089.100.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.822.111.501	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	32.200.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.437.223.599	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	234.100.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	768.862.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	185.565.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	279.120.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	47.020.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	95.790.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.090.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.310.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.430.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	410.035.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	413.393.774	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.000.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	5.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	86.525.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.615.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.423.211.226	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	34.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	162.410.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.466.152.499	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	98.512.280.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	13.450.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	35.324.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	606.005.100	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	505.220.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	74.315.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	484.700.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	484.700.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	20.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	120.700.000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	10.000.000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	41.100.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	41.100.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.600.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.600.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	189.403.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5.000.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5.000.000	
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	7.000.000	
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	7.000.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	5.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5.000.000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	172.403.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	169.403.000	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	3.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	215.199.900	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	215.199.900	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	215.199.900	
1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah	106.663.087.484	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.592.401.484	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.592.401.484	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.592.401.484	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	70.000.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	70.000.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.070.686.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.070.686.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.920.701.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	149.985.000	
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Kesehatan/Puskesmas Karangasem I	4.281.403.180	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.281.403.180	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.281.403.180	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.281.403.180	
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesehatan/Puskesmas Karangasem II	3.593.203.400	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.593.203.400	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.593.203.400	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.593.203.400	
1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesehatan/Puskesmas Manggis I	2.458.946.650	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.458.946.650	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.458.946.650	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.458.946.650	
1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesehatan/Puskesmas Manggis II	1.281.902.320	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.281.902.320	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.281.902.320	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.281.902.320	
1.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesehatan/Puskesmas Abang I	3.319.576.200	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.319.576.200	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.319.576.200	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.319.576.200	
1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesehatan/Puskesmas Abang II	3.192.575.900	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.192.575.900	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.192.575.900	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.192.575.900	
1.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesehatan/Puskesmas Kubu I	4.035.806.572	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.035.806.572	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.035.806.572	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.035.806.572	
1.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesehatan/Puskesmas Kubu II	3.343.118.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.343.118.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.343.118.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.343.118.000	
1.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesehatan/Puskesmas Rendang	3.502.352.600	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.502.352.600	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.502.352.600	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.502.352.600	
1.02.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesehatan/Puskesmas Sidemen	3.369.426.180	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.369.426.180	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.369.426.180	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.369.426.180	
1.02.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesehatan/Puskesmas Selat	5.079.252.557	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.079.252.557	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.079.252.557	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.079.252.557	
1.02.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesehatan/Puskesmas Bebandem	3.200.029.800	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.200.029.800	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.200.029.800	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.200.029.800	
1.02.0.00.0.00.01.0014	UPTD Laboratorium Kesehatan	3.491.633.650	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.491.633.650	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.491.633.650	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.491.633.650	
1.02.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesehatan RS Pratama	1.744.213.375	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.744.213.375	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.744.213.375	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.744.213.375	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83.831.789.292	
1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83.831.789.292	
1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83.831.789.292	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.819.413.292	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.689.463	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.398.200	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.386.600	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.316.600	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.236.600	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.351.463	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.419.450.844	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.419.450.844	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.804.800	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.403.200	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.421.900	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.825	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.979.875	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.138.705	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	46.941.026	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.197.679	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.854.870	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.777.970	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.996.900	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.474.610	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.475.410	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.300.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	469.699.200	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	14.818.499.748	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.930.444.598	
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	318.486.198	
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	3.079.500	
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	152.929.400	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	857.463.000	
1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	254.049.800	
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	344.436.700	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.888.055.150	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	10.532.612.650	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.355.442.500	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	31.594.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	31.594.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	31.594.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.352.150.280	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.352.150.280	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	3.119.204.800	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	232.945.480	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	240.916.100	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	240.916.100	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	24.187.400	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	216.728.700	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	52.196.258.172	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	52.196.258.172	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	105.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	742.563.150	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	4.262.120.450	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	30.033.778.100	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	7.537.804.900	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.874.108.172	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	5.716.839.400	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	28.939.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	136.066.800	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	39.931.300	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	39.931.300	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	17.638.300	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	11.008.400	
1.03.11.2.02.04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	6.629.900	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	31.094.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	15.290.400	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	15.803.600	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	47.403.200	
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	15.575.500	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	31.827.700	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	236.890.900	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	23.135.750	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	23.135.750	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	60.714.400	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	28.572.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	32.142.400	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	153.040.750	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	26.802.200	
1.03.12.2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	17.164.700	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	109.073.850	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.245.695.860	
1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.245.695.860	
1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.245.695.860	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.315.704.810	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.219.500	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.884.025	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.884.025	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.871.650	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.871.650	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.708.150	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.695.776.860	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.630.977.185	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64.799.675	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.239.425	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.106.000	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.629.500	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.914.050	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.389.875	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.969.000	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.770.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.999.000	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.200.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.500.025	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.900.025	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.600.000	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	197.974.930	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	197.974.930	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	197.974.930	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.394.609.220	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	183.400.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	101.698.600	
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	81.701.400	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	9.211.209.220	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	9.211.209.220	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	337.406.900	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	337.406.900	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	35.135.050	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	244.923.850	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	57.348.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.076.546.365	
1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	12.013.468.879	
1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	12.013.468.879	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.003.387.054	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.998.975	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.825	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.499.725	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.499.825	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.499.825	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.999.775	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.222.934.716	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.186.934.716	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.911.606	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.765.000	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.714.800	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166.957.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.594.175	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.880.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.131	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.924.800	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.980.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.944.800	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.616.957	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.616.957	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.010.081.825	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.116.882.375	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	676.319.925	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	246.821.700	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	97.753.150	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	95.987.600	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	893.199.450	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	21.135.150	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60.499.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	811.564.500	
1.05.0.00.0.00.02.00	Dinas Pemadam Kebakaran	3.993.755.015	
1.05.0.00.0.00.02.00	Dinas Pemadam Kebakaran	3.993.755.015	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.753.393.915	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.685.560	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	130.685.560	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.292.968.148	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.292.968.148	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.078.747	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.700	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.589.350	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.207.250	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.456.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.327.447	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.437.100	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.637.100	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.224.360	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.024.360	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.200.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.240.361.100	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.102.582.450	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.102.582.450	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	137.778.650	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	137.778.650	
1.05.0.00.0.00.04.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.069.322.471	
1.05.0.00.0.00.04.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.069.322.471	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.172.522.546	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.702.700	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.702.700	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.624.208.942	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.624.208.942	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.232.475	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.014.300	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.218.400	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.999.775	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.259.800	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	158.998.700	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.261.100	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.118.629	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.118.779	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.999.850	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.896.799.925	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	474.342.425	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	361.199.925	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	113.142.500	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.422.457.500	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.422.457.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.968.797.233	
1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	5.968.797.233	
1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	5.968.797.233	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.799.771.233	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.600.000	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.800.000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.800.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.127.966.213	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.053.566.213	
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	74.400.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.531.380	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.616.900	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.240.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.674.480	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.073.640	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.500.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.000.000	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.573.640	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.600.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.200.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.400.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	622.843.650	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	622.843.650	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	26.650.600	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	104.161.750	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	146.643.650	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	291.770.750	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	53.616.900	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.073.056.850	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.073.056.850	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	588.200.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	44.200.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	264.400.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	86.656.850	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	48.000.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	41.600.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	238.390.800	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	238.390.800	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	141.472.850	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	96.917.950	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	111.934.700	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	82.054.200	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	82.054.200	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	29.880.500	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29.880.500	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	122.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	122.800.000	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	122.800.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.975.614.503	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan	5.975.614.503	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan	5.975.614.503	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.535.635.328	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.468.425	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.471.575	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.996.850	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.886.845.333	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.886.845.333	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.789.950	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.323.200	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.286.150	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250.955.500	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.303.600	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.921.500	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.500.000	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.031.620	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.031.620	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	315.000.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	250.000.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	250.000.000	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.725.900	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.725.900	
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	26.566.650	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	26.566.650	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.707.450	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	25.707.450	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	60.007.450	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	25.025.850	
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	3.501.100	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	10.914.750	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	10.610.000	
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.489.100	
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	7.489.100	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	10.006.100	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	10.006.100	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	9.994.900	
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	9.994.900	
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.491.500	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.491.500	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	64.971.725	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.470.350	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	8.334.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	8.334.100	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	11.802.150	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	36.501.375	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.916.400	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.165.175	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	5.996.800	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	17.423.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.638.429.625	
2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.638.429.625	
2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.638.429.625	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.442.930.425	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.421.500	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.421.500	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.060.533.725	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.060.533.725	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.831.900	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.542.200	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.308.200	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.641.500	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.500.000	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.500.000	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.843.300	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.894.000	
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.949.300	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.800.000	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.180.000	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.620.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	71.599.475	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	41.560.900	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	41.560.900	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.038.575	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30.038.575	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	27.539.800	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.539.800	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.539.800	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	52.499.725	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.069.950	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.069.950	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.429.775	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.429.775	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	43.860.200	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.860.200	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.860.200	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.835.109.544	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	2.835.109.544	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	2.835.109.544	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.634.749.419	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.110.900	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	765.400	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	831.900	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	809.400	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	880.200	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.824.000	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.361.378.444	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.310.978.444	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.400.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.783.175	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.132.800	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.446.600	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.493.600	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.710.175	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.900.000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.900.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.576.900	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.326.300	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.250.600	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	117.310.325	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	58.136.450	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	58.136.450	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	59.173.875	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	59.173.875	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	42.024.800	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.024.800	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	42.024.800	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	41.025.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41.025.000	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41.025.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.438.178.332	
2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	13.438.178.332	
2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	13.438.178.332	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.356.055.723	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.040.175	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.124.475	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.915.700	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.776.955.248	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.776.955.248	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.298.000	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.003.200	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.545.800	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.549.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.593.900	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.996.800	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.397.100	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.168.400	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.168.400	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	125.674.900	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	125.674.900	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	125.674.900	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	256.088.250	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	250.503.900	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	178.734.850	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	30.697.750	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	41.071.300	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5.584.350	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	5.584.350	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	660.019.250	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	660.019.250	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	660.019.250	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	24.955.800	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	24.955.800	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	24.955.800	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	24.869.400	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.869.400	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.869.400	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20.339.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20.339.000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.339.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.970.176.009	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	7.887.264.325	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	25.137.875	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	4
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.102.126.450
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	760.000.000
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	82.911.684
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	82.911.684
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.850.528.896
2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.850.528.896
2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.850.528.896
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.150.028.646
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.567.950
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.775.350
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.193.550
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.999.650
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	66.599.500
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.999.900
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.160.008.908
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.074.648.308
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	85.360.600
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.302.688
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.995.200
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.672.250
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.194.000
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.441.275
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.999.963
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.397.100	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.200.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.197.100	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.752.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267.200.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.600.000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.952.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.116.494.375	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.156.495.275	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	151.700.350	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	515.996.075	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	488.798.850	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	959.999.100	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	9.999.100	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	950.000.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.273.676.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	252.200.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	212.200.000	
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	40.000.000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.011.476.000	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	169.000.000	
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	842.476.000	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.000.000	
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	10.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	310.329.875	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	139.630.500	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	129.630.600	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	9.999.900	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	170.699.375	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.899.500	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	53.199.875	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	67.600.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.656.004.315	
2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.656.004.315	
2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.656.004.315	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.291.404.315	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.264.400	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	753.550	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	799.550	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	711.300	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.818.752.278	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.616.207.078	
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.058.000	
2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.243.200	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.244.000	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.100.100	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.558.000	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.160.000	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.382.100	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.257.137	
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9.257.137	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.830.400	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.150.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.350.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.330.400	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.200.000	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.200.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	59.600.000	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	59.600.000	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	3.000.000	
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	41.600.000	
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	4.000.000	
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	11.000.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	16.000.000	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	16.000.000	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8.000.000	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	8.000.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	172.800.000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	172.800.000	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12.846.650	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	57.100.000	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	15.000.000	
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3.000.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	15.000.000	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	15.285.400	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	6.991.200	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.737.800	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	6.415.550	
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	7.214.600	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	24.208.800	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	116.200.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.200.000	
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	10.000.000	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	26.000.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19.000.000	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15.000.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	32.200.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	7.000.000	
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	7.000.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.685.520.282	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.0.00.0.00.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	6.685.520.282	
2.14.0.00.0.00.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	6.685.520.282	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.229.606.282	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.409.046.282	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.409.046.282	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	675.706.025	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.009.600	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.166.700	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	622.325.000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.999.725	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.045.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.500.000	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.353.975	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.484.775	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.869.200	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	32.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	32.500.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	32.500.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.286.842.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.251.198.400	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	32.500.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	591.606.400	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	523.172.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	103.920.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	38.265.600	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	38.265.600	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	997.378.000	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.028.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	908.850.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.907.000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20.593.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.136.572.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.136.572.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.000.000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	468.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	270.336.000	
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	368.236.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.288.559.001	
2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	17.288.559.001	
2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	17.288.559.001	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.589.981.351	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.663.100	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.663.100	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.985.447.171	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.904.834.421	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.053.700	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75.559.050	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.027.200	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.705.500	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.403.200	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.958.500	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.960.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.328.100	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.328.100	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.950.942.880	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.400.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.843.244.680	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.298.200	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.572.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244.572.900	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.698.577.650	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.080.165.200	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.138.324.600	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	941.840.600	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	296.000.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	296.000.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.330.243.150	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.965.847.850	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	318.482.100	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45.913.200	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75.250.175	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	51.211.100	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	24.039.075	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	107.308.800	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	107.308.800	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	809.610.325	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	809.610.325	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.230.698.980	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.230.698.980	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.230.698.980	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.730.618.880	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.700.500	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.675.500	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.025.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.414.867.880	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.414.867.880	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.482.000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.289.600	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.032.900	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.593.500	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.646.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.949.530.100	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.943.159.600	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.170.500	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.038.400	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.722.400	
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.496.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.820.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	160.228.550	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	160.228.550	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	33.976.700	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	56.298.550	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	37.474.500	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	32.478.800	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	339.851.550	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.225.300	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.225.300	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.626.250	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	38.970.950	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	159.274.150	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	19.729.900	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	39.652.350	
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	34.998.900	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.238.896.813	
2.17.0.00.0.00.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.238.896.813	
2.17.0.00.0.00.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.238.896.813	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.202.034.813	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.625.900	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.852.900	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.217.250	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.679.600	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.897.000	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.979.150	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.632.378.983	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.527.978.983	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.400.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.515.400	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.200.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.223.200	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.092.200	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.923.500	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.123.500	
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.800.000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.591.030	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.658.700	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.632.330	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.300.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	369.500.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	369.500.000	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	120.600.000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	248.900.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	314.762.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	314.762.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Kabupaten/Kota		
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	43.800.000	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	270.962.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	352.600.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	352.600.000	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	287.314.100	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	31.203.300	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	34.082.600	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.306.241.293	
2.18.2.18.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.306.241.293	
2.18.2.18.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.306.241.293	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.498.241.293	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.143.900	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.807.450	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.590.700	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.197.450	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.548.300	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.905.954.487	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.871.730.087	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.224.400	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.143.700	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.996.700	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.934.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.055.000	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.158.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.224.100	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.850.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379.200.000	
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.174.100	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	712.775.106	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.484.106	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	475.291.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	187.245.350	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	164.543.650	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	70.772.850	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	93.770.800	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	22.701.700	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	22.701.700	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	66.327.900	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	66.327.900	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	66.327.900	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	450.137.750	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	450.137.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	198.755.900	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	223.473.300	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	27.908.550	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	60.170.400	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.170.400	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	37.336.500	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	22.833.900	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	44.118.600	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.118.600	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	44.118.600	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.052.191.464	
1.01.2.19.0.00.03.00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.052.191.464	
1.01.2.19.0.00.03.00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.052.191.464	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.473.161.389	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.373.161.389	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	133.947.165	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	101.600.400	
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	462.833.524	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	674.780.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.579.030.075	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	621.578.675	
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	621.578.675	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	957.451.400	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	957.451.400	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	45.015.600	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.015.600	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.015.600	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	45.015.600	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.015.600	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	25.019.650	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	19.995.950	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	19.994.400	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.994.400	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.994.400	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	19.994.400	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.994.400	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.994.400	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.029.486.371	
2.22.0.00.0.00.01.00	Dinas Kebudayaan	6.029.486.371	
2.22.0.00.0.00.01.00	Dinas Kebudayaan	6.029.486.371	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.492.086.371	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.180.200	
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.180.200	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.099.346.971	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.097.166.371	
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.180.600	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.002.400	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	985.300	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.576.800	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.979.500	
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.960.800	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.170.350	
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.666.100	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.100	
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.859.950	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.644.200	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.386.450	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.886.450	
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.296.800.000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	66.800.000	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	66.800.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	840.600.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	775.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	65.600.000	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.389.400.000	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	45.000.000	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.344.400.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	94.400.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	94.400.000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	94.400.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	79.400.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.400.000	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	79.400.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	66.800.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	66.800.000	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	66.800.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.819.840.696	
2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.819.840.696	
2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.819.840.696	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.196.032.696	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.723.600	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.723.600	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.738.305.312	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.738.305.312	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.438.784	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.332.200	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.071.400	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.998.050	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.037.134	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.023.400	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.594.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000	
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.629.400	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.541.600	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.241.600	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.300.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	549.891.675	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	512.591.850	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	463.866.850	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	48.725.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.299.825	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	37.299.825	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	73.916.325	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	63.452.925	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	63.452.925	
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.463.400	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	10.463.400	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	112.774.000	
2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.774.000	
2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.774.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	84.399.550	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	84.399.550	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	35.050.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	49.349.550	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	28.374.450	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	28.374.450	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	28.374.450	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.336.514.243	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	5.336.514.243	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	5.336.514.243	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.732.182.390	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.377.100	
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	941.100	
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	977.600	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.998.200	
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.999.200	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.461.000	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.233.708.508	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.194.108.508	
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.600.000	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.642.106	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.034.400	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.694.600	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.735.400	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.012.700	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.165.006	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.867.500	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.251.500	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.416.000	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.200.000	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.587.176	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.440.806	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.500.000	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.646.370	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	112.794.403	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	66.399.953	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	66.399.953	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	46.394.450	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	46.394.450	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.491.537.450	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	102.799.650	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	51.399.675	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	51.399.975	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.388.737.800	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.282.738.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	105.999.800	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.633.388.600	
3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	10.633.388.600	
3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	10.633.388.600	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.209.765.800	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.754.100	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.599.000	
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.105.800	
3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.655.000	
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.681.800	
3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	712.500	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.631.448.150	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.532.133.750	
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95.400.000	
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.914.400	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.252.650	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.532.300	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.195.700	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.845.500	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.953.950	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.225.200	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.200.000	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.800.000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.400.000	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.110.900	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.110.900	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.467.811.850	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	300.358.500	
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	32.098.650	
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	268.259.850	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.808.255.550	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.746.943.325	
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	29.134.800	
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	32.177.425	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	359.197.800	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	359.197.800	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	320.802.525	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	320.802.525	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	38.863.900	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	65.555.725	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	29.675.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	186.707.100	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	635.008.425	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	635.008.425	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	562.916.775	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	27.086.475	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	45.005.175	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	18.067.825.294	
3.27.0.00.0.00.01.00	Dinas Pertanian	18.067.825.294	
3.27.0.00.0.00.01.00	Dinas Pertanian	18.067.825.294	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.577.726.019	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.819.840	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.085.790	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	736.900	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	736.900	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.249.700	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.437.200	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.573.350	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.502.809.354	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.392.310.454	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	110.498.900	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	453.538.525	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.679.600	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.635.700	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.862.250	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.140.975	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.220.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.797.300	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.300.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.497.300	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.761.000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.761.000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.000.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	378.095.700	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	101.167.700	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	56.792.500	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	44.375.200	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	276.928.000	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	44.200.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	175.929.000	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	56.799.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	181.493.825	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	113.594.000	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	44.194.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	69.400.000	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	67.899.825	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	67.899.825	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	626.941.650	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	533.842.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	533.842.000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	93.099.650	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	93.099.650	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	183.000.550	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	183.000.550	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	56.801.300	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	69.400.000	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	56.799.250	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	88.374.850	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.374.850	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	44.198.900	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	44.175.950	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.032.192.700	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.032.192.700	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	905.992.700	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	56.800.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	69.400.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.511.333.700	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.511.333.700	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.511.333.700	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	18.798.875	
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di	18.798.875	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	18.798.875	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.315.006.300	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.155.048.700	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.990.248.700	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.164.800.000	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	159.957.600	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9.957.600	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	91.223.500	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	35.622.475	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35.622.475	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	44.399.450	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	36.399.675	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	7.999.775	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.201.575	
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	11.201.575	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	52.199.700	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.199.700	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	13.999.850	
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	38.199.850	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	14.550.400	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	14.550.400	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	2.995.700	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	11.554.700	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	19.554.925	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	19.554.925	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	19.554.925	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11.392.099.060	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.392.099.060	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.392.099.060	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.244.300.085	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.972.175	
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.530.300	
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.441.875	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.274.492.554	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.230.092.554	
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.400.000	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.411.325	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.500.000	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.721.400	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.129.225	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.739.700	
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.321.000	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.336.511	
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96.300.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	419.636.511	
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.400.000	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.087.520	
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.887.520	
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.200.000	
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6.088.114.825	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	6.088.114.825	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	11.715.375	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6.038.199.450	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	38.200.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	18.284.225	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	18.284.225	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	18.284.225	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	41.399.925	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	41.399.925	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	41.399.925	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	9.992.550	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan	9.992.550	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan	9.992.550	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	9.992.550	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.992.550	
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	9.992.550	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	38.527.589.359	
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	38.527.589.359	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan	661.639.176	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	193.381.700	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.151.800	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.538.800	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.613.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.029.900	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.029.900	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.500.000	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.700.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.200.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.500.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	468.257.476	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	343.788.300	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	86.000.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	85.988.500	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	171.799.800	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	124.469.176	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	124.469.176	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Hukum	868.856.560	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	144.211.710	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.915.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.413.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.502.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.215.900	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.215.900	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.080.810	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.080.810	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	724.644.850	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	724.644.850	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	210.237.450	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	398.692.200	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	115.715.200	
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Organisasi	468.826.180	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	468.826.180	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.456.400	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.165.200	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.291.200	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	325.769.780	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	115.081.500	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	59.110.080	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	49.600.350	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	42.321.800	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	59.656.050	
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	436.225.360	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.459.360	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.271.750	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.272.400	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.999.350	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.687.400	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.687.400	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.000	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.980.210	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.980.210	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	285.766.000	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	208.766.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	88.400.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	71.581.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	48.785.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	77.000.000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	40.000.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	37.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Administrasi Pembangunan	485.933.975	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.659.900	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.775.100	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.489.050	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.286.050	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.284.800	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.784.800	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	373.274.075	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	373.274.075	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	77.805.025	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	153.927.850	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	141.541.200	
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.361.100.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	145.668.500	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.268.500	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.745.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.523.500	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.400.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.400.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.215.431.500	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.215.431.500	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.015.431.500	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.036.763.120	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.036.763.120	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.476.100	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.476.100	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.000.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.400.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.400.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.812.887.020	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	487.316.200	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	944.952.620	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	380.618.200	
4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Perencanaan dan Keuangan	15.644.372.312	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.644.372.312	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.332.800	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.993.625	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.339.175	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.345.047.562	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.208.510.812	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.536.750	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.449.250	
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.255.000	
4.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.194.250	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.142.700	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.323.700	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.819.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.900.000	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.500.000	
4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Umum	15.155.067.876	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.155.067.876	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.218.103.624	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.256.600	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.340.406.400	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.174.800.360	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138.185.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.362.425.689	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.116.029.575	
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.050.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.750.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.300.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.159.715.000	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.450.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	864.000.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.265.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.033.374.188	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.020.800.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.036.960.998	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.353.190	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.500.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.852.760.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.181.784.064	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	770.534.064	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	311.250.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.364.041.000	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	648.925.500	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	648.925.500	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	66.190.000	
4.01.0.00.0.00.01.0010	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	408.804.800	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.706.575	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.392.875	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.678.400	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.320.100	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.394.375	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.863.700	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	28.863.700	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.000	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.000.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	311.098.225	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	311.098.225	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	241.629.425	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	28.653.950	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40.814.850	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	56.747.954.695	
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	56.747.954.695	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	56.747.954.695	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.676.486.092	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.710.400	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.704.400	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.389.600	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.616.400	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.239.994.478	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.131.398.028	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.375.250	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	92.221.200	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.346.199.300	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.634.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.666.300	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	605.916.400	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.297.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	234.960.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.730.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.040.000	
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	217.955.600	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.213.906.500	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.638.500.000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	68.006.500	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	345.800.000	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.600.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	821.707.300	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375.600.000	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	441.307.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.710.712.410	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	698.410.610	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	296.909.800	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	715.392.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28.559.852.604	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	27.809.720.304	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	696.662.200	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	53.470.100	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	692.403.100	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	692.403.100	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.071.468.603	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.392.119.511	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	876.841.680	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.515.277.831	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	743.726.990	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	158.070.400	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	119.463.800	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	140.061.300	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	140.061.300	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	186.070.190	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	493.295.900	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	99.211.650	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	99.448.100	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	96.806.150	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	98.918.600	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	98.911.400	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.330.522.702	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	3.096.851.395	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	416.507.557	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	817.163.750	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.768.950.700	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	71.342.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.697.608.700	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5.342.852.800	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.342.852.800	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	6.934.772.380	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.934.772.380	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.934.772.380	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.144.161.230	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.478.550	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.267.250	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	834.350	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	834.350	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.476.350	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.476.350	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.589.900	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.045.793.853	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.920.465.953	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.315.000	
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.012.900	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.125.850	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.995.500	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.845.550	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.284.800	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.290.450	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.180.000	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.110.450	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.100.100	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.600.100	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.372.427	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.748.600	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.177.457	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.446.370	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.264.102.900	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	971.656.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	132.753.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	838.903.000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	155.791.800	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	92.891.800	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	62.900.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	136.655.100	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	136.655.100	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	526.508.250	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	182.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.000.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.000.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.000.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.000.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.000.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	37.000.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.000.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	184.810.750	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.120.400	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24.476.850	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.033.800	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	70.615.700	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.885.200	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.304.200	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.567.700	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	7.806.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	159.697.500	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.235.550	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.048.450	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.268.600	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	44.797.900	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.918.200	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.255.300	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	34.285.900	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.887.600	
5.02	KEUANGAN	223.424.059.305	
5.02.0.00.0.00.04.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	223.424.059.305	
5.02.0.00.0.00.04.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	223.424.059.305	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.482.589.148	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.654.150	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.954.400	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.699.750	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.138.805.803	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.064.667.903	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.300.000	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.837.900	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.000.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	485.745.930	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.493.900	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.155.500	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.750.280	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.846.250	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.300.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.200.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.029.900	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.989.900	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.940.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.100.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.353.365	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.016.600	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.600.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148.736.765	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	203.768.470.832	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	439.001.535	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	39.203.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	39.203.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	9.960.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	9.960.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	27.061.900	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	17.236.100	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	144.447.735	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	109.212.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	42.717.800	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	322.902.200	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	30.145.400	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	58.777.600	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	130.952.700	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	103.026.500	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	254.403.075	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	61.994.100	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	10.757.700	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	40.314.700	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24.788.150	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100.743.125	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tindakan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.412.700	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	7.366.800	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	3.025.800	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	202.604.386.922	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	179.757.282.900	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.600.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	18.247.104.022	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	147.777.100	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	147.777.100	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	209.700.225	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	209.700.225	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	35.517.325	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.196.800	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	29.642.700	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	21.918.400	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	36.219.700	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	27.045.600	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	9.541.600	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	13.918.300	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11.699.800	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.963.299.100	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.963.299.100	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	116.765.850	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	88.373.650	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	114.769.600	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	42.662.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	62.163.800	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	183.533.450	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	41.352.900	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	11.598.100	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	76.375.700	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	16.871.350	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.208.832.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03	KEPEGAWAIAN	6.570.776.831	
5.03.0.00.0.00.01.00	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.570.776.831	
5.03.0.00.0.00.01.00	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.570.776.831	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.790.793.031	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.125.000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.125.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.915.481.995	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.908.981.995	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.743.000	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.456.200	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.647.200	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.956.400	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.183.200	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.227.500	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.994.200	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.233.300	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.418.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.218.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.400.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.800.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.797.536	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.682.536	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.115.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	779.983.800	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	315.209.050	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	66.896.100	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	77.929.850	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	56.323.750	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	83.468.400	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	30.590.950	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	183.401.400	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	90.000.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	93.401.400	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	178.379.800	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	99.390.500	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	78.989.300	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	102.993.550	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	50.000.000	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	23.985.350	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	14.697.200	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	14.311.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	634.426.700	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	634.426.700	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	634.426.700	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	634.426.700	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	150.939.900	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	150.939.900	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	207.939.900	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	207.939.900	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	207.939.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	207.939.900	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	67.607.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	67.607.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	7.216.041.207	
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	7.216.041.207	
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	7.216.041.207	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.581.353.607	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.200.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.200.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.646.425.904	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.646.425.904	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.968.900	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.531.000	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.786.800	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.444.300	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.006.800	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.200.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264.542.500	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.542.500	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.467.500	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.407.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.660.000	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.200.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.748.803	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.451.400	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.297.403	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	278.057.600	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	253.057.600	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30.000.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	38.997.800	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	80.000.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	20.000.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	84.059.800	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	25.000.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25.000.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	356.630.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	128.630.000	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	128.630.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	228.000.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	89.000.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	139.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	35.050.458.317	
7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Karangasem	11.313.170.821	
7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Karangasem	5.835.684.651	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.740.484.651	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.964.350	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.964.350	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.292.826.211	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.185.426.211	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.483.700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.971.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.841.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.470.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.210.390	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.450.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.802.690	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.957.700	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.600.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.800.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.600.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.200.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	30.200.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.500.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.500.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.500.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.500.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.500.000	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Subagan	1.663.597.100	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	364.097.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.400.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.401.700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.496.700	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.623.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.996.200	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.285.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.798.200	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.198.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.497.100	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.697.100	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.800.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.141.664.400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.141.664.400	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.582.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	574.855.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	528.996.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	28.230.800	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	157.835.700	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	157.835.700	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	157.835.700	
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Karangasem	2.130.278.720	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.598.725	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.000.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.020.220	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.493.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.322.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.204.320	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.200.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.200.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.527.200	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.432.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.595.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.851.305	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.851.305	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.848.679.995	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.848.679.995	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.461.875	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	412.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.379.218.120	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	32.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Padangkerta	1.683.610.350	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	395.450.200	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.000.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.143.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.814.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.275.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.054.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.533.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.508.100	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.024.900	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.748.900	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.248.900	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.025.200	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.729.200	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.296.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.288.160.150	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.288.160.150	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.245.100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	598.645.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	643.133.700	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	29.135.850	
7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Abang	3.763.751.946	
7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Abang	3.763.751.946	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.533.351.946	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.300.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.081.750	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	492.050	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	691.925	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	567.050	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	567.225	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.900.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.095.795.146	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.002.595.146	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.800.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.516.500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.496.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.520.400	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.499.900	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.140.300	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.750.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.707.800	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.682.500	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.100.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.300.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109.400.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.800.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.800.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	30.800.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	29.800.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	69.200.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	69.200.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.400.000	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.800.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.500.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.500.000	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.300.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.300.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.400.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18.900.000	
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Kubu	2.827.381.882	
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Kubu	2.827.381.882	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.659.381.882	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.548.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	750.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.548.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.244.758.003	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.206.264.603	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.493.400	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.843.967	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.694.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.438.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.263.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.008.967	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.408.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.208.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.823.912	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.823.912	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.000.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	19.996.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.004.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	57.000.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	17.000.000	
7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Bebandem	3.064.471.196	
7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Bebandem	3.064.471.196	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.952.471.196	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.575.297.416	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.415.497.416	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	154.800.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.688.400	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.316.150	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.372.250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.793.700	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.990.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.500.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.303.700	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.691.680	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.691.680	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.000.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.000.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.000.000	
7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Selat	3.523.070.242	
7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Selat	3.523.070.242	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.395.144.767	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.996.425	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	499.725	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	499.975	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	499.850	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	499.975	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	499.725	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.497.175	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.862.178.282	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.799.678.382	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.499.900	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.090.260	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.856.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.443.960	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.789.400	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.913.400	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.913.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.966.400	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.966.400	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	64.400.450	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	54.415.650	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	54.415.650	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.984.800	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.995.100	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.989.700	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.565.775	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.565.775	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.569.500	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.999.675	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.996.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.996.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.996.600	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.996.600	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.962.650	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.962.650	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.987.550	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.987.550	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.987.550	
7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Rendang	4.236.361.052	
7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Rendang	4.236.361.052	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.088.361.052	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.250.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.250.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.589.048.812	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.527.548.812	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.971.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.465.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.006.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.200.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.200.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.780.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.780.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.861.240	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.861.240	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	58.000.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	32.000.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	26.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.000.000	
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Sidemen	3.138.979.842	
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Sidemen	3.138.979.842	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.038.995.117	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.999.400	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	999.800	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.499.975	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.499.750	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.499.875	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.539.773.807	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.485.073.832	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.200.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.499.975	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.423.610	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.493.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.859.350	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.999.700	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.471.360	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.098.300	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.300.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.998.300	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.700.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.700.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.985.175	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.150	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.150	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.985.025	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.999.950	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.985.075	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.999.650	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.999.650	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.999.650	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.999.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.999.800	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.999.800	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.100	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.100	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Manggis	3.183.271.336	
7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Manggis	3.183.271.336	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.002.671.411	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.499.800	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.750	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	999.050	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	499.825	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	999.775	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.400	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.580.311.336	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.564.011.336	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.800.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.870.275	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.994.275	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.376.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.830.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.500.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.830.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.160.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.660.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.900.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	27.900.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	27.900.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.999.925	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.999.925	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.999.925	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.900.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.900.000	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.900.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.800.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.800.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29.800.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.000.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.551.152.719	
8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.551.152.719	
8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.551.152.719	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.070.935.596	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.013.900	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.735.600	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.421.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.741.600	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.943.800	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.976.400	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.730.500	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.464.400	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.176.266.196	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.176.266.196	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.769.900	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.047.500	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.322.900	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.856.800	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.542.700	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.485.600	
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.680.000	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.220.000	
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.585.600	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.400.000	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.000.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.400.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.000.000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.000.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	435.687.050	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	435.687.050	
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	66.896.250	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	337.521.050	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	31.269.750	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	958.000.523	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	958.000.523	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	67.000.475	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.999.700	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	856.000.348	
8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	94.999.950	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	94.999.950	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	64.999.950	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	344.152.300	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	344.152.300	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	224.463.100	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	119.689.200	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	647.377.300	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	647.377.300	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	372.070.350	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55.406.950	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	219.900.000	